

KONSISTENSI MEDIA MAINSTREAM LOKAL KALIMANTAN BARAT DALAM MENJAGA ETIKA PUBLIK DI ERA DISRUPSI DIGITAL

Romdlon

Mahasiswa Magister Studi Islam IAIN Pontianak

romdlon.165@gmail.com

Abstract

The era of digital disruption has shifted the paradigm of communication in West Kalimantan, marked by the transfer of information authority from newsrooms to global digital platform algorithms. This condition has triggered the phenomenon of post-truth and information overload, which has implications for the erosion of the role of local mainstream media as guardians of public ethics and gatekeepers of credible information. This study aims to analyze the factors causing the weakening of the role of local mainstream media in West Kalimantan and to formulate an ethical reorientation model based on communication principles in the Qur'an as a preventive measure against social damage (al-fasād). The study uses a descriptive qualitative method with a literature study and Tafsir Maudhu'i (thematic) approach. Primary data was obtained from the text of the Qur'an and authoritative tafsir books, while secondary data came from contemporary media theory and observation of local media phenomena. Data analysis was conducted using content analysis techniques to synthesize the reality of media practices with Islamic normative values. The results of the study indicate the erosion of the role of mainstream media, characterized by the dominance of algorithms over editorial policies, the speed of news production that trumps accuracy, audience fragmentation through filter bubbles, and the commodification of news.

Keywords: Local mainstream media, Digital disruption, Public ethics

Abstrak

Era disrupsi digital telah menggeser paradigma komunikasi di Kalimantan Barat, ditandai oleh perpindahan otoritas informasi dari ruang redaksi ke algoritma platform digital global. Kondisi ini memicu fenomena *post-truth* dan banjir informasi yang berimplikasi pada erosi peran media mainstream lokal sebagai penjaga etika publik dan *gatekeeper* informasi yang kredibel. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab melemahnya peran media mainstream lokal di Kalimantan Barat serta merumuskan model re-orientasi etis berbasis prinsip komunikasi dalam Al-Qur'an

sebagai upaya preventif terhadap kerusakan sosial (al-fasād). Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan Tafsir Maudhu'i (tematik). Data primer diperoleh dari teks Al-Qur'an dan kitab tafsir otoritatif, sedangkan data sekunder berasal dari teori media kontemporer dan observasi fenomena media lokal. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi untuk menyintesis realitas praktik media dengan nilai-nilai normatif Islam. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya erosi peran media mainstream yang ditandai oleh dominasi algoritma atas kebijakan redaksi, kecepatan produksi berita yang mengalahkan akurasi, fragmentasi audiens melalui filter *bubbles*, serta komodifikasi berita.

Kata Kunci: *Media mainstream lokal, Etika publik, Disrupsi digital*

A. INTRODUCTION

Dunia sedang mengalami krisis otoritas informasi di era disrupsi digital. Pada era konvergensi media tersebut media massa atau media mainstream bukan lagi dominasi tunggal melainkan ekosistemnya sudah sangat kompleks, interaktif dan terfragmentasi. Laporan (Zarary, 2025) memperkuat pernyataan tersebut karena media arus utama yang dahulu didaulat sebagai penjaga kebenaran kini tengah menghadapi kondisi kritis terkait hilangnya kepercayaan publik.

Dilansir dari timesindonesia.co.id, berdasarkan laporan global, lebih dari sepertiga orang meragukan media mainstream dibanding lima tahun lalu. Menurut Reuters Institute 2024, hanya 40 % responden global saat ini “percaya pada berita kebanyakan waktu”, turun dari 44 % saat pandemi. Data di Indonesia pun sejalan, menyusul banjir konten digital dan disinformasi, kepercayaan masyarakat terhadap media arus utama merosot tajam (Zarary, 2025).

(Ibrahim, 2024) mengutarakan hal yang sama bahwa media mainstream telah lama diakui sebagai salah satu otoritas yang berperan penting dalam membentuk dan mengintervensi makna kebenaran. Fungsi media sebagai kontrol sosial tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawabnya untuk menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya. Namun Seiring dengan perkembangan zaman, kebenaran yang disampaikan media arus utama mulai dipertanyakan. Pada awalnya, media arus utama (*mainstream*) menjadi satu-satunya sumber informasi yang dipercaya oleh publik. Namun, dengan munculnya media sosial dalam dekade terakhir, kepercayaan publik terhadap media arus utama itu mulai tergeser.

Selanjutnya, catatan disrupsi digital telah mengubah *landscap* media Indonesia secara drastis. Perkembangan media sosial, platform berbasis algoritma, serta *attention economy* (ekonomi perhatian), tidak hanya memengaruhi bisnis media, tetapi juga menggeser praktik dan etika jurnalistik.

(Sudarmanto, 2025) Dalam situasi tersebut ia menawarkan deontologi media sebagai sebuah etika berbasis kewajiban dan norma profesi menjadi semakin relevan sebagai fondasi moral untuk menjaga fungsi pers dalam demokrasi.

(Nurmiarani et al., 2024) mengungkapkan digitalisasi media memungkinkan perluasan jangkauan audiens secara global, peningkatan kecepatan distribusi informasi, serta keterlibatan pengguna dalam bentuk interaksi dua arah. Namun demikian, tantangan besar muncul dalam bentuk disinformasi, fragmentasi audiens, penurunan kualitas jurnanisme, dan dominasi algoritma yang berpotensi bias.

Dalam paradigma lama, media mainstream bertindak sebagai *gatekeeper* (penjaga gawang) tunggal yang memastikan setiap informasi telah melewati proses kurasi, verifikasi, dan penyuntingan berdasarkan standar kode etik jurnalistik. Namun, kehadiran disrupsi digital telah meruntuhkan tembok kendali tersebut. Kini, setiap individu memiliki kapasitas untuk memproduksi dan mendistribusikan konten secara instan tanpa terikat oleh tanggung jawab moral maupun legal. Pergeseran ini tidak hanya mengubah cara informasi dikonsumsi, tetapi juga mendemokratisasi penyebaran data yang sering kali mengabaikan aspek akurasi demi mengejar viralitas dan keterlibatan (*engagement*) publik.

Dampak paling nyata dari pergeseran ini adalah fenomena banjir informasi (*information overload*) yang menyebabkan masyarakat kehilangan kemampuan untuk membedakan antara fakta, opini, dan manipulasi informasi. Dalam kondisi ini, kebenaran sering kali tenggelam di tengah hiruk-pikuk konten yang bombastis, menciptakan apa yang disebut sebagai era *post-truth*.

Fenomena kebenaran baru dalam bahasa Dahlan Iskan tersebut atau *post-truth* telah menciptakan anomali dalam ruang publik digital, di mana fakta objektif sering kali kalah pengaruhnya dibandingkan dengan daya tarik emosional dan keyakinan pribadi. Dalam ekosistem ini, kebenaran tidak lagi diukur berdasarkan korespondensi data, melainkan pada seberapa kuat sebuah informasi mampu mengonfirmasi prasangka atau perasaan pembaca.

Akibatnya, narasi yang provokatif dan sensasional lebih cepat menyebar dibandingkan berita yang faktual namun kering. Kondisi ini menciptakan masyarakat yang terfragmentasi ke dalam "gelembung filter" (*filter bubbles*), di mana individu hanya terpapar pada informasi yang mereka sukai, sehingga menutup ruang dialog yang sehat dan mengaburkan batas antara kebenaran wahyu, fakta empiris, dan sekadar opini yang menyesatkan.

Ketika media *mainstream* terjebak dalam arus *clickbait* demi mengejar performa digital, fungsi mereka sebagai penyaring kebenaran menjadi tumpul. Hal ini menjadi masalah serius dalam perspektif Al-Qur'an, karena melemahnya

fungsi penyaringan informasi (*filterisasi*) berisiko menyebarkan *syubhat* (keraguan) yang dapat merusak tatanan etika publik dan keharmonisan sosial. Maka di sinilah letak urgensi dari isu media mainstream sebagai penjaga etika di era digital dalam perspektif Al-Quran penting untuk didialogkan ke ruang publik. Tidak ada kata terlambat dalam menggaungkan gagasan konstruktif sebagai upaya membangun kesadaran kolektif menuju masyarakat informatif yang lebih beretika.

Media mainstream sebagai penjaga etika publik melalui lensa Al-Qur'an penting untuk dibahas dan mendesak. Sebab, nalar publik hari ini sudah semakin mengawatirkan dan terjadinya perubahan struktur. (Nawar, 2024) mengungkapkan pada era *post-truth* sebagai kondisi ketika emosi lebih kuat daripada fakta, dan pembentukan opini publik lebih ditentukan oleh resonansi perasaan dibanding keteguhan pembuktian. Dimana kebenaran tidak hanya diperdebatkan, tetapi juga diperebutkan secara sistematis. Sehingga jangan sampai nalar publik rusak. Hal ini juga dikemukakan (Mahendra Kusuma, 2021) bahwa ketika rusak maka debat berubah menjadi saling serang, kebijakan kalah oleh sensasi dan akibatnya demokrasi dapat runtuh perlahan dari dalam.

Terlebih Al-Qur'an telah memberikan peringatan mengenai bahaya persepsi yang keliru akibat informasi yang tidak terverifikasi, sebagaimana prinsip *tabayyun* yang menjadi antitesis terhadap kekacauan informasi di ruang siber. Media mainstream dituntut untuk tidak sekadar ikut dalam arus percepatan, melainkan menjadi jangkar etis yang mengembalikan hakikat informasi sebagai alat pencerah umat, bukan sumber fitnah dan perpecahan sosial.

Hebermas dalam (Rohmah, 2025) menyebut praktik sosial berupa ruang publik dimana rasionalitas komunikatif tergantikan oleh emosi, polarisasi, dan kepentingan strategis. Dalam konteks lokal maupun nasional, distorsi tersebut semakin kuat karena rendahnya literasi media dan tingginya ketergantungan publik pada media sosial sebagai sumber informasi utama. Lagi-lagi meminjam istilah (Sudarmanto, 2025) media pada posisi itu menghadapi ujian; Apakah akan menjadi penjernih wacana, atau sekedar penguat kebisingan digital. Deontologi media juga diuji dalam relasi antara jurnalisme dan aktivisme. Ditegaskan bahwa kecepatan tidak boleh mengalahkan kebenaran dan viralitas tidak boleh menggantikan verifikasi.

Era disrupsi, batas antara *al-haqq* (kebenaran) dan *al-batil* (kebatilan) menjadi kabur akibat teknik manipulasi informasi digital (seperti *deepfake* atau narasi *Artificial Intelligence*) (Fauzi, 2023). Tanpa peran media *mainstream* yang konsisten pada nilai-nilai Al-Qur'an, masyarakat akan terjebak dalam kesesatan informasi (*dhann*) yang dianggap sebagai keyakinan. Membahas ini penting

untuk mengembalikan fungsi media sebagai *Furqan* (pembeda) di ruang publik, sesuai dengan semangat Al-Qur'an dalam memisahkan gandum dari sekam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis media arus utama (*media mainstream*) sebagai dominasi tunggal yang tidak bisa dilepaskan perannya dalam mendapatkan informasi publik, dengan fokus pada perannya sebagai penjaga etika dalam perspektif Al-Quran. Berbeda dengan studi terdahulu yang menekankan pada analisis keberadaan media arus utama di tengah disrupsi digital antara bertahan atau tenggelam. Lebih kepada analisis kredibilitas media di era disrupsi digital dan bagaimana strategi menghadapi misinformasi di era digital tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat topik Konsistensi Media *mainstream* lokal Kalimantan Barat dalam menjaga etika publik di era disrupsi digital.

B. THEORETICAL FRAMEWORK

1. Media Mainstream

Media mainstream (media arus utama) dalam penelitian ini didefinisikan sebagai lembaga penyiaran atau penerbitan berita yang memiliki badan hukum resmi, terikat oleh Kode Etik Jurnalistik, dan terdaftar di Dewan Pers. Secara spesifik dalam lokus penelitian ini, media mainstream merujuk pada media cetak, elektronik, dan portal berita daring resmi di Kalimantan Barat yang memiliki struktur redaksional formal dan berfungsi sebagai otoritas penyaring informasi (*gatekeeper*) bagi masyarakat.

Media mainstream juga dapat dimaknai sebagai institusi media yang mapan dan memiliki struktur redaksional formal dalam memproduksi informasi. Menurut (Shoemaker & Vos, 2009) dalam bukunya yang berjudul *Gatekeeping Theory*, media mainstream berfungsi sebagai "penjaga gawang" yang menentukan informasi mana yang layak menjadi konsumsi publik melalui proses seleksi yang ketat. Dalam penelitian ini, media mainstream merujuk pada lembaga pers di Kalimantan Barat yang berbadan hukum dan patuh pada regulasi Dewan Pers.

2. Etika Publik

Etika publik merujuk pada seperangkat nilai, norma, dan moralitas yang menjadi panduan dalam berperilaku di ruang publik demi kemaslahatan bersama (Prasetijowati, 2025). Dalam konteks komunikasi massa, etika publik bukan sekadar kepatuhan administratif terhadap hukum, melainkan tanggung jawab media untuk menyajikan informasi yang jujur, adil, tidak diskriminatif, dan bertujuan mencerdaskan serta menjaga harmoni sosial masyarakat.

Etika publik dapat pula didefinisikan sebagai standar moral yang memandu tindakan dalam ruang publik demi kemaslahatan umum. Hebermas dalam (Calhoun, 1993) menekankan bahwa etika publik berkaitan erat dengan "tindakan komunikatif" yang harus didasarkan pada kejujuran dan rasionalitas untuk membentuk ruang publik yang sehat. Variabel ini mengacu pada tanggung jawab moral media dalam menjaga harmoni dan kecerdasan berpikir masyarakat.

3. Disrupsi Digital

Disrupsi digital adalah perubahan paradigma akibat teknologi yang merusak tatanan lama. (Christensen & Benioff, 2024) menjelaskan bahwa disrupsi menciptakan sistem komunikasi di mana kecepatan dan algoritma digital sering kali menyingkirkan standar jurnalisme tradisional, sehingga memicu kekacauan informasi.

Dengan demikian Disrupsi digital ialah perubahan fundamental dalam ekosistem informasi akibat kemajuan teknologi digital dan internet yang menggantikan sistem lama (konvensional) dengan sistem baru yang lebih instan. Dalam penelitian ini, disrupsi digital ditandai dengan munculnya media sosial dan algoritma digital yang mengikis otoritas media mainstream, menyebabkan banjir informasi (*information overload*), serta memicu fenomena *post-truth* di mana kecepatan distribusi mengalahkan ketepatan verifikasi.

4. Perspektif Alquran

Al-Qur'an diposisikan sebagai sumber epistemologi etika komunikasi transendental. komunikasi perspektif Al-Qur'an sebagai proses penyampaian pesan yang terikat pada nilai-nilai tauhid dan tanggung jawab sosial (Nahria et al., 2023). Dalam penelitian ini, Al-Qur'an digunakan sebagai kerangka normatif untuk menguji praktik media melalui prinsip *Tabayyun* (verifikasi) dan *Qawlan Sadidan* (kata-kata yang benar).

Perspektif Al-Qur'an dapat didefinisikan sebagai sudut pandang atau pisau analisis yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagai pedoman transendental. Dalam penelitian ini, perspektif tersebut difokuskan pada prinsip-prinsip komunikasi Qur'ani (*Islamic Communication Ethics*), terutama konsep *Tabayyun* (verifikasi), *Qawlan Sadidan* (ucapan yang benar), dan *Amanah* (tanggung jawab), yang digunakan untuk mengevaluasi dan memberikan solusi terhadap krisis etika di era digital.

C. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kepustakaan yang mengintegrasikan realitas media kontemporer dengan nilai-nilai normatif Al-Qur'an. Pendekatan Studi Analisis isi digunakan untuk menganalisis fenomena disrupsi digital, *post-truth*, dan mekanisme *gatekeeping* pada media mainstream lokal Kalimantan Barat. Sementara itu, pendekatan Tafsir *Maudhu'i* (tematik) diterapkan untuk menghimpun dan menganalisis ayat-

ayat Al-Qur'an tentang komunikasi, seperti tabayyun, qawlan sadidan, dan amanah, guna merumuskan etika publik yang komprehensif.

Selanjutnya, data primer diambil dari teks ayat Al-Qur'an al-Karim dan kitab-kitab tafsir otoritatif, adapun data sekunder berupa dokumen kode etik jurnalistik, laporan Dewan Pers, artikel ilmiah, buku disrupsi digital, dan kebijakan redaksional media lokal Kalimantan Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur, disertai observasi terhadap tren penurunan kepercayaan publik dan praktik *clickbait* pada media lokal. Analisis data menggunakan teknik analisis isi melalui tahap reduksi, penyajian, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan dengan mensintesis nilai *tabayyun* sebagai solusi etis atas fenomena post-truth dan kerusakan sosial.

D.RESULTS AND DISCUSSION

Erosi peran Media Mainstream dalam Pusaran Disrupsi Digital

Di Kalimantan Barat, media mainstream lokal (seperti *Pontianak Post*, *Tribun Pontianak*, *RRI*, dan TV lokal lainnya) secara historis memegang peranan sebagai "Jendela Informasi" sekaligus "Penjaga Moral" masyarakat yang multikultural. Secara tradisional, media mainstream di Kalimantan Barat bertindak sebagai pemegang otoritas informasi. Namun, (Shoemaker & Vos, 2009) menjelaskan bahwa di era digital, terjadi pergeseran dari *individual gatekeeping* menuju *networked gatekeeping*.

Media mainstream lokal kini kehilangan monopoli atas kebenaran. Munculnya akun-akun media sosial warga (seperti *citizen journalism* lokal) menciptakan apa yang disebut oleh (Tambunan, 2025) sebagai "kekacauan informasi yang tidak teregulasi". Di Kalbar, ketika media arus utama kalah cepat dengan unggahan viral di Instagram atau *Facebook* mengenai isu sensitif, otoritas mereka sebagai penyaring informasi mengalami erosi karena masyarakat lebih memilih "kecepatan" daripada "ketepatan".

Memasuki era disrupsi digital, peran tersebut mengalami erosi yang signifikan yang dapat diidentifikasi melalui beberapa fenomena berikut:

1. Pergeseran Otoritas dari Redaksi ke Algoritma

Isu-isu strategis di Kalimantan Barat seperti konflik sosial, tata kelola lahan sawit, hingga isu perbatasan dikurasi secara ketat melalui meja redaksi yang menekankan pada akurasi dan dampak sosial. Saat ini, tekanan untuk bertahan hidup di ruang digital memaksa media lokal bersaing dengan akun-akun informasi anonim di Instagram dan Facebook (seperti akun-akun *citizen journalism* lokal). Akibatnya, terjadi pergeseran dari jurnalisme yang mengutamakan kepentingan publik menuju jurnalisme yang didorong oleh algoritma (Zuhri et al., 2026). Media sering kali terjebak memproduksi konten yang "ramai di media sosial" (viral) demi mengejar jumlah klik, meskipun konten tersebut terkadang minim substansi dan jauh dari nilai-nilai etika publik.

2. Kecepatan Mengalahkan Ketepatan (*The Death of Fact-Checking*)

Budaya *real-time* menuntut media untuk mempublikasikan informasi dalam hitungan detik. Hal ini sering kali mengorbankan proses verifikasi (*Tabayyun*) yang menjadi khitah jurnalisme. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam *The Elements of Journalism* menegaskan bahwa "Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi." Disrupsi digital menciptakan fenomena jurnalisme *churnalism*—istilah dari Nick Davies—di mana media hanya mendaur ulang informasi dari media sosial tanpa melakukan pengecekan lapangan.

Fenomena tersebut di Kalimantan Barat terlihat saat terjadi insiden sosial atau bencana alam; media lokal terkadang mengutip video viral tanpa verifikasi lebih lanjut hanya agar tidak kehilangan momentum. Dalam perspektif Al-Qur'an, ini adalah pengabaian terhadap perintah *Tabayyun* yang berisiko menciptakan bencana bagi masyarakat.

Karakteristik disrupsi digital menuntut kecepatan instan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini terlihat saat terjadi peristiwa sensitif, seperti isu Suku, Agama, Ras, dan Antragolongan (SARA) atau bencana kabut asap. Akun-akun media sosial warga sering kali menyebarkan informasi tanpa sensor. Media mainstream lokal, karena takut kehilangan momentum dan pembaca, cenderung mengabaikan proses verifikasi berlapis demi menjadi yang pertama mengunggah berita. Erosi fungsi *gatekeeping* ini menyebabkan media mainstream tidak lagi menjadi "penyaring" (filter), melainkan hanya menjadi "pengeras suara" (*loudspeaker*) dari apa yang sedang gaduh di media sosial.

3. Fragmentasi Pembaca dan Gelembung Filter (*Filter Bubbles*)

Teknologi digital telah memecah masyarakat Kalbar yang majemuk ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan preferensi informasi masing-masing. (Osburg & Heinecke, 2019) menjelaskan bahwa algoritma menciptakan isolasi intelektual. Masyarakat hanya melihat apa yang mereka sukai, bukan apa yang perlu mereka ketahui. Cass Sunstein dalam *Republic.com* menyebut ini sebagai "ruang gema" (*echo chambers*) yang memperkuat polarisasi.

Masyarakat Kalbar yang sangat beragam kini cenderung mengonsumsi informasi melalui grup-grup *WhatsApp* atau linimasa media sosial yang terpolarisasi. Media mainstream lokal yang seharusnya menjadi titik temu (*common ground*) bagi dialog lintas etnis dan agama, mulai kehilangan audiens loyalnya. Masyarakat lebih percaya pada tokoh-tokoh lokal atau *influencer* digital yang menyuarkan emosi mereka daripada jurnalis profesional. Hal ini memperlemah posisi media mainstream sebagai penjaga etika publik, karena suara mereka tenggelam dalam kebisingan opini publik yang emosional dan tidak jarang bermuatan hoaks.

4. Dilema Ekonomi dan Komodifikasi Berita

Media di Kalimantan Barat terjebak dalam praktik *clickbait* untuk menjaga eksistensi perusahaan. Berita-berita sensasional lebih diprioritaskan daripada berita investigasi yang mendalam. Secara teologis, hal ini mengaburkan prinsip *Amanah* (tanggung jawab) karena informasi hanya dijadikan alat pemuas pasar, bukan alat pencerah umat.

Erosi ini juga dipicu oleh faktor ekonomi. Penurunan pendapatan dari iklan konvensional membuat media mainstream lokal di Kalimantan Barat sangat bergantung pada iklan digital dan kerja sama pemerintah daerah. Kondisi ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang mengaburkan fungsi kontrol sosial media. Etika publik sering kali dikorbankan demi menjaga hubungan dengan pengiklan atau demi konten yang sensasional agar menarik minat pasar. Dalam perspektif Al-Qur'an, kondisi ini merupakan bibit dari munculnya informasi yang bersifat *syubhat* (meragukan) dan menjauh dari nilai *qawlan sadidan* (ucapan yang benar atau urus).

Selanjutnya penting menguraikan konseptualisasi teologis terhadap masalah yang terjadi di Kalimantan Barat sebagai tawaran sudut pandang baru terhadap media mainstream sebagai penjaga etika publik di era disrupsi digital. Prinsip-prinsip komunikasi dalam Al-Qur'an bukan sekadar aturan moral individu, melainkan dapat ditransformasikan menjadi SOP (*Standard Operating Procedure*) bagi media mainstream lokal untuk merebut kembali kepercayaan publik.

Restorasi Etika Media Melalui Prinsip Komunikasi Al-Qur'an: Solusi Terhadap Krisis Informasi di Kalimantan Barat

Mengatasi erosi peran sebagai penjaga etika, media mainstream di Kalimantan Barat perlu melakukan "re-orientasi etis" dengan mengadopsi prinsip-prinsip komunikasi yang termaktub dalam Al-Qur'an. Kegagalan media mainstream lokal dalam menghadapi disrupsi bukan hanya persoalan teknis, melainkan krisis eksistensial etika. Clifford Christians, seorang pakar etika media dalam bukunya *Media Ethics: Cases and Moral Reasoning*, menegaskan bahwa media membutuhkan "norma dasar" (*proto-norms*) yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan universal untuk bertahan dari tekanan komersialisasi. Bagi media di Kalimantan Barat, Al-Qur'an menawarkan "re-orientasi etis" yang melampaui standar profesionalisme sekuler menuju tanggung jawab transendental.

Prinsip pertama *Tabayyun* (QS. Al-Hujurat [49]: 6) sebagaimana dalam tafsir Ibu Katsir hadir dan sejalan sebagai antitesis terhadap fenomena *Information Disorder*. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam karya monumental mereka *The Elements of Journalism* menyebut bahwa "inti dari jurnalisme adalah

disiplin verifikasi." Dalam konteks Kalimantan Barat, media seringkali tergesa-gesa mengutip unggahan warga di media sosial terkait isu sensitif. Dengan mengadopsi prinsip *Tabayyun*, media mainstream melakukan "re-orientasi" dari jurnalisme kecepatan (*fast journalism*) menuju jurnalisme akurasi. Hal ini sejalan dengan teori Denis McQuail dalam *McQuail's Mass Communication Theory* tentang peran media sebagai "pemberi makna" yang harus memastikan kebenaran informasi sebelum dilempar ke ruang publik demi menghindari fitnah sosial.

Prinsip kedua, Qawlan Sadidan yang berarti Objektivitas dan Kejujuran. Narasi *Qawlan Sadidan* berarti perkataan yang benar, jujur, dan tidak berbelit-belit. (Hefni, 2017) menguraikan ungkapan *qaulan sadidan* menurut bahasa adalah perkataan yang benar. Ungkapan ini terdapat dalam surah Annisa ayat 9 dan Al Ahzab ayat 70. Kendati konteks ayat ini terkait dengan peristiwa menjelang kematian. Kepada semuanya Allah memerintahkan untuk bertaqwa kepadaNya dan mengungkapkan perkataan yang benar. Lebih lanjut ia memaknai kata *qaulan sadidan* secara umum bermakna perkataan yang tepat dengan kondisi yang ada seperti menembakkan anak panah ke sasaran yang dituju. Al-Jaziri mendefinisikan *qaulan sadidan* dengan dua kata yaitu *shidqan-iban* yang artinya benar dan tepat sasaran. Tidak semua kata yang benar menjadi tepat kalau ditempatkan pada posisi yang tidak benar.

Prinsip ketiga Qawlan Layyinan: Moderasi dalam Keberagaman Berdasarkan QS. Surah Thaha ayat 44 yang artinya "Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut". Konteks ayat ini pada peristiwa Firaun yang saat itu berada pada puncak kedurjanaan dan kesombongannya tidak mungkin menerima apa yang dikatakan oleh Musa dan Harun. Apalagi Musa pernah dibesarkan olehnya. Sombong adalah salah satu bentuk dari kerasnya hati. Hati yang sombong akan menolak kebenaran yang datang dari orang lain dan akan merendahkan orang yang ada di hadapannya. Untuk menghadapi hati dalam kondisi seperti ini Allah memerintah Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menggunakan strategi *qaulan layyinan*. Hati yang keras dilawan dengan kata yang penuh kelembutan.

Berdasarkan para ulama *qaulan layyinan* adalah upaya untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang lunak, tidak memvonis, mengingatkan tentang sesuatu seperti yang disepakati seperti kematian, dan memanggilnya dengan panggilan yang disukai.

Mengingat Kalimantan Barat adalah wilayah yang multietnis dan multireligius, prinsip *Qawlan Layyinan* (perkataan yang lemah lembut dan santun) sangat relevan. Media mainstream harus menjadi penyejuk di tengah provokasi digital. Alih-alih menggunakan diksi yang mempertajam polarisasi,

media harus menggunakan bahasa yang persuasif dan edukatif untuk menjaga kedamaian sosial (*ukhuwah wathaniyah*). Ini adalah peran media sebagai penjaga etika publik dalam memelihara harmoni lokal.

Prinsip Amanah dan Pertanggungjawaban Publik QS. Al-Isra': 36) mengandung beberapa pesan utama: Larangan Berbicara Tanpa Ilmu, Amanah Panca Indera dan Hati, Prinsip Pertanggungjawaban (Akuntabilitas), Kaitan dengan Pertanggungjawaban Publik. Secara ringkas, Tafsir Al-Misbah menekankan pentingnya integritas, kehati-hatian dalam menerima dan menyampaikan informasi, serta kesadaran bahwa setiap penggunaan kapasitas manusiawi terutama dalam ranah sosial dan publik adalah sebuah amanah yang akan dinilai di akhirat kelak.

Prinsip *Amanah* (QS. Al-Isra [17]: 36) menegaskan bahwa setiap informasi akan dimintai pertanggungjawaban. Ini merupakan bentuk tertinggi dari *Social Responsibility Theory* yang dikembangkan oleh Hutchins Commission. Media di Kalbar harus menyadari bahwa otoritas informasi yang mereka miliki adalah "amanah publik". James Carey dalam *Communication as Culture* menyatakan bahwa komunikasi adalah proses ritual untuk mempertahankan masyarakat dalam waktu. Jika media mainstream konsisten pada nilai Amanah, mereka tidak akan membiarkan ekosistem digital Kalbar dipenuhi oleh sampah informasi. Mereka bertindak sebagai penjaga gawang yang sadar bahwa setiap berita memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, media mainstream lokal Kalimantan Barat tidak lagi hanya mengejar eksistensi secara kuantitas (jumlah klik), melainkan secara kualitas (keberkahan informasi). Solusi Al-Qur'an ini menawarkan Kedaulatan Informasi bagi masyarakat Kalimantan Barat, di mana kebenaran ditegakkan di atas kepentingan algoritma.

Konsistensi Media sebagai Instrumen Preventif Terhadap *Al-Fasad* (Kerusakan Sosial) di Kalimantan Barat

Dalam perspektif Al-Qur'an, kerusakan (*al-fasad*) tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga kerusakan nalar publik dan harmoni sosial akibat penyebaran informasi yang sesat. Di Kalimantan Barat, wilayah dengan sejarah dinamika sosial yang kompleks, konsistensi media mainstream dalam menerapkan nilai-nilai *Tabayyun* dan *Qawlan Sadidan* menjadi sangat krusial sebagai "benteng pertahanan" terakhir terhadap anarkisme informasi. Fungsi fungsi strategis di jabarkan sebagai berikut

1. Meredam Potensi Konflik Horizontal melalui "Filtering" Informasi

Kalimantan Barat memiliki struktur masyarakat yang plural. Di era disrupsi, provokasi berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) sangat mudah disulut melalui narasi-narasi pendek di media sosial. Jika media mainstream lokal tetap konsisten melakukan verifikasi ketat sebelum merilis isu-isu sensitif, mereka berperan sebagai peredam panas (*cooling system*). Konsistensi ini mencegah terjadinya *fitnah* yang dalam Al-Qur'an disebut lebih kejam dari pembunuhan – sehingga masyarakat tidak terprovokasi melakukan aksi anarkis. Media menjadi instrumen penangkal *al-fasad* dengan cara mendinginkan suasana ruang publik lewat informasi yang jernih.

Dalam konteks Kalimantan Barat yang multietnis, media mainstream harus berfungsi sebagai *buffer* (penyangga) sosial. Analisis ini diperkuat oleh Teori Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility Theory*) yang dikemukakan oleh Siebert, Peterson, dan Schramm. Teori ini menyatakan bahwa media memiliki kewajiban moral untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau pasar.

Ketika media melakukan *filtering* terhadap isu SARA yang provokatif, mereka sedang menjalankan fungsi *Amr Ma'ruf Nahi Munkar*. Sejalan dengan pemikiran Jurgen Habermas mengenai *Public Sphere* (Ruang Publik), media harus menjadi ruang diskusi yang rasional. Di Kalbar, jika media tidak konsisten melakukan filterisasi, maka yang terjadi adalah apa yang disebut Thomas Hobbes sebagai "perang semua melawan semua" (*bellum omnium contra omnes*) karena distorsi informasi. Konsistensi dalam *Tabayyun* mencegah provokasi digital berubah menjadi kekerasan fisik, sehingga *al-fasad* dalam bentuk konflik horizontal dapat diredam sebelum meledak.

2. Melawan Hegemoni Post-Truth dengan Otoritas Kebenaran

Kerusakan sosial sering kali berawal dari hilangnya standar kebenaran di tengah masyarakat. Saat hoaks dianggap sebagai kebenaran hanya karena disebarkan secara masif (algoritma), maka nalar publik sedang mengalami kerusakan.

Konsistensi media mainstream nasional di daerah dalam menyajikan berita faktual akan menciptakan "pusat rujukan informasi". Ketika masyarakat Kalbar meragukan sebuah video atau pesan berantai di WhatsApp, mereka kembali ke media mainstream sebagai rujukan otoritatif. Dengan menjaga marwah kebenaran, media mencegah kerusakan mentalitas masyarakat yang "mudah percaya" pada kebohongan.

Fenomena *post-truth* di Kalimantan Barat dapat dijelaskan melalui teori "Spiral of Silence" dari Elisabeth Noelle-Neumann. Di era digital, individu cenderung diam jika pendapat mereka berbeda dengan narasi dominan (meskipun hoaks) di media sosial.

Media mainstream nasional di daerah harus hadir sebagai pemecah kesunyian tersebut dengan otoritas kebenaran. Mengacu pada konsep

"*Hyperreality*" dari Jean Baudrillard, di mana simulasi (hoaks) dianggap lebih nyata daripada kenyataan, media mainstream harus mengembalikan publik pada realitas objektif (*Qawlan Sadidan*). Dengan otoritasnya, media mainstream berfungsi sebagai institusi penentu kebenaran (*Truth-telling institution*). Konsistensi media dalam menyajikan data valid di tengah banjir emosi digital adalah bentuk perlawanan terhadap hegemoni kebohongan yang sistematis, yang dalam Al-Qur'an digambarkan sebagai upaya memisahkan yang hak dari yang batil.

3. Penjaga Moralitas Publik dari Konten Amoral dan Eksploitatif

Disrupsi digital membawa arus konten yang sering kali menabrak norma kesantunan dan etika publik demi rating. Media yang berpegang pada prinsip *Qawlan Sadidan* dan *Amanah* tidak akan mengeksploitasi tragedi atau privasi individu di Kalimantan Barat demi *clickbait*. Dengan konsisten menolak konten yang merusak moral (seperti pornografi, perjudian digital, atau perundungan), media berperan menjaga "ekosistem ruhani" masyarakat. Inilah bentuk nyata pencegahan *fasad fil ardh* (kerusakan di muka bumi) dalam dimensi psikologis dan budaya.

Eksploitasi konten demi trafik dapat dianalisis menggunakan teori Komodifikasi Informasi mengingatkan bahwa ketika informasi hanya dianggap sebagai komoditas ekonomi, nilai-nilai kemanusiaan dan etika sering kali dikorbankan (Setiadi, 2024).

Kalimantan Barat, praktik *clickbait* yang mengeksploitasi penderitaan atau sensualitas adalah bentuk degradasi martabat manusia (*Karamah Insaniyah*). Analisis ini sejalan dengan teori Etika Deontologi Immanuel Kant, yang menekankan bahwa manusia (dan audiens) tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat (untuk klik/iklan), tetapi sebagai tujuan (untuk diedukasi). Media yang konsisten menolak konten amoral menjalankan fungsi *Hisbah* (pengawasan moral). Dengan tidak memberikan ruang bagi konten yang mengeksploitasi privasi atau tragedi lokal, media mainstream menjaga nalar dan kesehatan mental publik dari pembusukan moral (*al-fasad al-akhlaqi*) yang dibawa oleh arus liberalisme digital (Prabowo, 2020).

4. Kontrol Sosial Terhadap Tata Kelola Lingkungan dan Pemerintahan

Salah satu bentuk *al-fasad* yang nyata di Kalimantan Barat adalah eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab. Media mainstream yang konsisten pada kode etik akan terus menyuarakan kebenaran terkait isu lingkungan (seperti kebakaran hutan atau sengketa lahan) meskipun di bawah tekanan kepentingan modal. Jurnalisme yang berpihak pada kemaslahatan umat

(*mashlahah*) membantu mencegah kerusakan alam yang lebih luas melalui fungsi pengawasan yang tajam dan independen.

Konsistensi media *mainstream* bukan sekadar pilihan bisnis, melainkan kewajiban teologis untuk mencegah kehancuran tatanan hidup bersama di Kalimantan Barat. Media yang konsisten menjalankan nilai-nilai Al-Quran bertransformasi menjadi "*Syifa*" (Obat) bagi penyakit informasi digital dan "*Nur*" (Cahaya) di tengah kegelapan era *post-truth*.

Prinsip-prinsip etik qurani di atas diintegrasikan dengan media studi kontemporer dalam praktik jurnalistik modern di era disrupsi digital, secara konseptual normatif peneliti menawarkan buku panduan jurnalistik profetik. Panduan ini sesuai dengan konteks sosial politik di Kalimantan barat.

E. CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa media *mainstream* lokal di Kalimantan Barat tengah mengalami krisis otoritas di tengah era disrupsi digital. Dominasi algoritma media sosial mendorong menguatnya fenomena *post-truth* yang berimplikasi pada melemahnya fungsi *gatekeeping* media. Orientasi pada kecepatan dan viralitas telah menggeser prioritas akurasi dan etika, sehingga peran media sebagai penjaga etika publik cenderung tereduksi oleh kepentingan trafik digital.

Di sisi lain, Al-Qur'an menawarkan fondasi etis yang komprehensif melalui prinsip *tabayyun*, *qawlan sadidan*, dan amanah yang relevan serta aplikatif dalam praktik jurnalistik. Konsistensi penerapan nilai-nilai tersebut berpotensi menjadi instrumen preventif terhadap kerusakan sosial (*al-fasad*), seperti polarisasi SARA dan penyebaran hoaks, sekaligus menjaga moralitas publik. Oleh karena itu, media *mainstream* lokal perlu merumuskan dan mengimplementasikan *blueprint* kebijakan redaksional berbasis etika Qur'ani yang dilembagakan melalui pakta integritas dan diaktualisasikan secara berkelanjutan dalam praktik peliputan dan produksi berita.

F. REFERENCES

- Calhoun, C. (1993). *Habermas and the Public Sphere*. MIT Press.
- Christensen, C. M., & Benioff, M. (2024). *The Innovator's Dilemma, with a New Foreword: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Harvard Business Review Press.
- Fauzi, I. (2023). *Etika Muslim: Panduan Komprehensif Islam Seputar Akhlak dan Moralitas Umat*. Pustaka Kanz Birry.
- Hefni, H. L. M. A. (2017). *Komunikasi Islam*. Prenada Media.
- Ibrahim, M. A. (2024). *ANTARA dan tuntutan kebenaran di era media sosial*. ANTARAJATIM. <https://jatim.antaranews.com/berita/857440/antara-dan-tuntutan-kebenaran-di-era-media-sosial>
- Mahendra Kusuma, S. H. (2021). *Pergulatan Intelektualitas untuk Politik dan Demokrasi*. Bening Media Publishing.
- Nahria, N., Laili, I., & Nuryanti, T. (2023). Analisis Hermeneutik Nilai-Nilai Komunikasi Dalam Proses Pembelajaran Berbasis Al-Qur'an. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 18(1), 51–65.
- Nawar, M. F. (2024). Analisis Kualitatif terhadap Fenomena "Peringatan Darurat Garuda Biru": Memahami Peran Framing dan Resonansi Emosional dalam Membentuk Opini Publik. *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 13(2), 235–250. <https://doi.org/https://doi.org/10.33508/jk.v13i2.6144>
- Nurmiarani, M., Firmansyah, D., & Hariyati, F. (2024). MASA DEPAN MEDIA MASSA DI ERA DIGITAL: PELUANG, RISIKO, DAN STRATEGI. *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana*, 30(2), 141–151.
- Osburg, T., & Heinecke, S. (2019). *Media Trust in a Digital World: Communication at Crossroads*. Springer International Publishing.
- Prabowo, T. T. (2020). *Memperebutkan ruang publik virtual: literasi, hoax, dan perdamaian*. Zahir Publishing.
- Prasetijowati, T. (2025). *Dasar-Dasar Etika Publik*. Jakad Media Publishing.
- Rohmah, S. (2025). *Komunikasi Politik 5.0: Strategi, Media, dan Pengaruh Publik*. CV Eureka Media Aksara.
- Setiadi, M. D. (2024). Etika Dan Dampak Komodifikasi Komunikasi Dalam Industri Media Massa. *Sintesa*, 3(02), 38–61. <https://doi.org/10.30996/sintesa.v3i02.11188>

- Shoemaker, P. J., & Vos, T. (2009). *Gatekeeping Theory*. Taylor & Francis.
- Sudarmanto, B. (2025). *Deontologi Media di era disrupsi digital : Tantangan Etis dalam konteks Indonesia*. HarianPelita.Id. <https://harianpelita.id/pelitahati/deontologi-media-di-era-disrupsi-digital-tantangan-etis-dalam-konteks-indonesia-catatan-bagus-sudarmanto/>
- Tambunan, D. (2025). Etika Dan Legalitas Narasi Jurnalistik Hiper-Lokal: Analisis Produksi Konten Media Tanpa Otorisasi Perusahaan Induk. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 3(4), 47–59.
- Zarary, R. (2025). *Krisis Kepercayaan terhadap Media Arus Utama, Siapa yang Bertanggung Jawab?* Tebuieng.Online. <https://tebuieng.online/krisis-kepercayaan-terhadap-media-arus-utama-siapa-yang-bertanggung-jawab/>
- Zuhri, A., Fazil, M., Haryono, H., & Baihaky, R. (2026). *Jurnalistik Digital: Teori, Strategi, dan Inovasi di Era Media Baru*. Star Digital Publishing.
-